



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>

MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
8(1).2026, hlm. 1- 12

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Karakter Civic Entrepreneurship Pada Mahasiswa

Muhammad Hasbi Ashshidiq, Meiwatizal Trihastuti, Feniawati Darmana

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi

mhasbiashshidiq@gmail.com

Naskah diterima : 26 Des 2025 Naskah direvisi: 26 Des 2025 Naskah disetujui : 25 Jan 2026
--

ABSTRACT

This research is motivated by citizenship education, which has a role in an effort to equip students with knowledge and basic skills related to citizen relations and citizens who can be relied upon by the nation and state. The application of citizenship education in terms of entrepreneurial character will encourage business actors to grow in accordance with the times. The existence of civic entrepreneurs in the form of economic democracy can encourage job creation, which can help the government overcome economic problems. This study investigates whether Citizenship Education influences the development of civic entrepreneur character in Pancasila and Citizenship Education Study Program (PPKn) STKIP Pasundan students. The research method used is the quantitative method. The results obtained in this study indicate that there is an influence of citizenship education on citizenship entrepreneurial character because the results show that the determination value obtained is 45.7% and the remaining 54.3% is determined by other variables outside this study.

Keywords: citizenship education, character, and civic entrepreneurship

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki peran sebagai usaha dalam membekali pengetahuan peserta didik serta kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara serta warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal karakter berwirausaha akan mendorong para pelaku usaha untuk tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan *Civic Entrepreneur* dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan sehingga dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Penelitian ini menganalisis Apakah Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap terbentuknya karakter *civic entrepreneur* pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP Pasundan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pada Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Karakter *Civic Entrepreneur*, karena hasil menunjukkan bahwa nilai determinasi yang diperoleh sebesar, 45, 7% dan sisanya 54,3% ditentukan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter, *Civic Entrepreneurship*

PENDAHULUAN

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (pgsd.upy.ac.id, 2018: 1). Hal ini dibukti pada pengalaman empiris yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka dapat menikmati kemakmuran bangsanya. Sebagai contoh adalah negara-negara seperti : Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan sebagainya (Surya, Mohamad dalam Pikiran Rakyat 14 Juli 2004). Lambatnya pertumbuhan pembangunan di Indonesia selama ini sesungguhnya menunjukkan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang sekaligus juga mencerminkan masih lemahnya sistem pendidikan di negara ini.

Pendidikan adalah kata kunci dalam mengembangkan pengetahuan dan kualitas kemampuan masyarakat. Artinya pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Dukungan terhadap pentingnya kontribusi pendidikan dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di antara negara-negara di dunia ini, sesungguhnya telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam proses keseluruhan pembangunan nasional (Harapan et al. 2005).

Pendidikan menjadi tolak ukur dalam sebuah keberhasilan, seperti halnya Pendidikan Kewarganegaraan hadir dalam

sebuah materi yang merupakan pelajaran yang wajib diterapkan di kalangan sekolah, tidak hanya di lingkungan SD, SMP, SMA bahkan keterlibatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup perguruan tinggi pun dijadikan sebagai mata kuliah dasar yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi pelajaran wajib seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, PPKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang dalam hal ini berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara, agar peran warga negara dapat tercapai dengan baik dan warga negara dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang materi pokoknya ialah demokrasi politik atau peran warga negara dalam aspek kehidupan. Adanya Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keilmuannya, sebagaimana hal ini juga merupakan salah satu bentuk pengamalan tri dharma perguruan tinggi yang di dalamnya termuat pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Mahasiswa PPKn dapat menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu *ouput* yang dapat menguntungkan bagi mahasiswa terlebih saat kondisi mendesak yang mengharuskan mahasiswa berpikir lebih jauh tentang bagaimana caranya dapat bertahan hidup dengan situasi yang mendesak. Dengan orientasi pemikiran yang lebih jauh kedepan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kekurangan lapangan pekerjaan, melalui pembekalan ilmu mengenai wirausaha di Pendidikan kewarganegaraan maka lahirnya istilah *civic entrepreneurship*. Sebagaimana diungkapkan oleh Trihastuti (2021) dalam Andrian (2021: hal. 716) berpendapat bahwa *civic entrepreneurship* dikembangkan untuk memahami realitas ekonomi baru dan didorong untuk bertindak berdasarkan visi yang optimis tentang bagaimana komunitas

mereka dapat sukses di dunia abad mendatang. Mereka percaya ekonomi global, baru kompleks, dan cepat berubah ini dapat memberikan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada individu, tempat, dan organisasi. *Civic entrepreneur* disini merangkul ekonomi regional mereka, peluang dan kebutuhannya, sebagai langkah awal membantu warga negara membuat pilihan positif tentang masa depan mereka, membangun hubungan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Sementara itu, Beater & Goss (1998 : hal.30) berpendapat bahwa *Civic Entrepreneur* membantu masyarakat berkolaborasi untuk mengembangkan dan mengatur aset ekonomi mereka dan untuk membangun hubungan yang produktif dan tangguh di seluruh sektor publik, swasta, dan sipil. Mereka menjalin ikatan yang mengikat ekonomi dan masyarakat untuk keuntungan bersama. Memberikan kesinambungan untuk mengerjakan masalah yang sulit dan terus bekerja dari waktu ke waktu. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Civic Entrepreneurship* sangat membantu warga atau masyarakat dalam mengembangkan wirausaha atau perekonomian yang produktif serta tangguh dalam menjalankan roda perekonomian tersebut berlandaskan orientasi yang jelas, sehingga warga atau masyarakat tersebut dapat meraih kesuksesannya di era globalisasi yang serba kompetitif. (Muti'ah dan Anwar 2021). Disini peneliti tertarik untuk membahas Apakah Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh terhadap terbentuknya karakter *Civic Entrepreneur* pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP Pasundan.

DASAR TEORI

1. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting ketika pemerintah menetapkan PKn menjadi salah satu mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimuat dalam kurikulum sekolah. Hal ini dibuat

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang antara lain mewajibkan isi kurikulum memuat pendidikan kewarganegaraan yang pada prinsipnya bertujuan membentuk *good citizenship* dan menyiapkan warga Negara untuk masa depan. Menurut Taupan (2013: hal.16) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang dirancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sehingga dapat berperan sebagai warga Negara yang efektif dan bertanggung jawab.

Secara paradigmatis Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga domain, yakni 1) domain akademik; 2) domain kurikuler; dan 3) aktivitas sosial-kultural (Winataputra, 2006 : hal.53) dalam jurnal Ana Andriani. Domain akademik adalah berbagai pemikiran tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praktis pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan formal dan non formal. Sedangkan domain sosial kultural adalah konsep dan praktis Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (Wahab dan Sapriya, 2011 : hal.97). Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

PPKn sebagai wahana psikologis-pedagogis diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan warga muda Indonesia yang berkarakter Pancasila (Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 59 tahun 2014; Winataputra, 2015). Pancasila merupakan ideologi, philosophische grondslag dan staat fundamental norm menjadi dasar dari pendidikan

dan pengajaran sebagai usaha negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Fearnley-sander & Ella, 2008; Latief, 2011; Sumantri & Winataputra, 2017). Pancasila diterjemahkan dimensi perwujudan tertib sosial dan dimensi-dimensi modal dan etis dalam masyarakat baik (*good society*) (Latief, 2020). Mewujudkan *good society* terlebih dahulu mengembangkan *good citizen* (warga yang baik) (Levine & Higgins-D'Alessandro, 2010; Pruysers, Blais, & Chen, 2019). "Fazli Rachman, dkk, diakses melalui <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/downloadSuppFile/1052/293> [2 Agustus 2022]"

PPKn merupakan wahana edukatif diharapkan mengembangkan profil pelajar Pancasila (Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014; Winataputra, 2015; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Profil tersebut adalah pelajar yang: berkebinekaan global; bergotong royong; kreatif; bernalar kritis; mandiri; serta beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Karena itu, sedapat mungkin setiap materi muatan PPKn merupakan terjemahan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam Pancasila tersebut (Fearnley-sander & Ella, 2008). Sehingga Pancasila menjadi entitas inti (*core values*) yang dijadikan rujukan; dasar kriteria pencapaian kompetensi; dan konstruksi dari ruang lingkup materi muatan mata pelajaran PPKn. PPKn dianggap sebagai wadah enkulturasi sistem nilai dan moral Pancasila (Liem & Mcinerney, 2010, hal. 150).

Bila merujuk pada kerangka fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Bab II Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa: ".....berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Tentu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyokong upaya negara mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Secara khusus berfokus pada upaya untuk mengembangkan potensi siswa menjadi warga dewasa yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra, 2015 : hal.4). Pendidikan Kewarganegaraan senada dengan tujuan demokratisasi melalui penyesuaian tata kelola dan kurikulum pendidikan Indonesia (Fearnley-sander & Ella, 2008, hal. 112). Pendidikan Kewarganegaraan di era reformasi Indonesia menopang pembangunan demokrasi dan menempatkan warga muda demokratis sebagai pilar tegaknya identitas dan karakter bangsa (El Muhtaj et al., 2020, hal. 375; Liem & Mcinerney, 2010, hal. 149).

Pendidikan Indonesia memiliki standar kompetensi lulusan sesuai dengan komponen kompetensi yang dikembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic competence*). Resiprokalitas kompetensi mencakup kemampuan sikap (*civic disposition*), pengetahuan (*civic knowledge*), dan keterampilan (*civic skills*) yang berlaku menyeluruh (Branson, 1999; Quigley, 1995; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2013; Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016). Secara umum, tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berupaya mengembangkan potensi warga muda melalui pengembangan seluruh dimensi kompetensi kewarganegaraan harus miliknya, yaitu (a) sikap kewarganegaraan, mencakup keteguhan, komitmen kebangsaan dan cinta tanah air, dan rasa tanggung jawab sebagai warga Indonesia; (b) pengetahuan kewarganegaraan; dan (c) keterampilan kewarganegaraan, mencakup kemampuan untuk berpartisipasi sebagai warga yang demokratis (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014;

Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014). PPKn nyata-nyatanya berupaya untuk menumbuhkembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah, serta kecakapan berpartisipasi secara bertanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan demokratis di Indonesia. (Rachman et al., 2021)

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas tahun 2006, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Selaras dengan hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan tertuang dalam UU tentang sistem pendidikan nasional, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara umum adalah media pengajaran serta media penyiapan menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat karena banyak muatan positif dalam PKN diantaranya tentang lembaga demokrasi, hak dan kewajiban negara, proses demokrasi politik dan ilmu hukum. Setelah memahami pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan juga merupakan bagian utuh Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu proses Pendidikan Kewarganegaraan perlu diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai pendapat Winataputra (2014: hal.1) dalam bahan diskusi Seminar Nasional PKN yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurutnya.

Karakter Civic Entrepreneurship

Entrepreneurship adalah seorang manusia, yang bertindak kreatif membangun suatu nilai dari hal yang secara praktis bukan apa-apa. Ini adalah pencarian peluang tanpa memperhatikan sumber-sumber daya, atau masing-masing sumber daya, yang ada. (Thimons, 2008). Lebih lanjut menurut (Alma, 2010, hal.24) wirausaha disini menekankan pada setiap orang yang memulai suatu bisnis yang baru. Sedangkan proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk menejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi.

M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer dalam (Suryana, 2013:hal.23) menjelaskan terdapat delapan karakter kerirausahaan yang dapat membentuk karakter *civic entrepreneurship* yaitu:

1. Rasa tanggung jawab (*desire for responsibility*), yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan selalu berkomitmen dan wawas diri.
2. Memilih resiko yang moderat (*preference for moderate risk*), yaitu lebih memilih resiko yang moderat, artinya selalu menghindari risiko, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
3. Percaya diri terhadap kemampuan sendiri (*confidence in their ability to success*), yaitu memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh kesuksesan.
4. Menghendaki umpan balik segera (*desire for immediate feedback*), yaitu selalu menghendaki adanya umpan balik dengan segera, ingin cepat berhasil.
5. Semangat dan kerja keras (*high level of energy*), yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
6. Berorientasi kedepan (*future orientation*), yaitu berorientasi masa depan dan memiliki prespektif dan wawasan jauh kedepan.

7. Memiliki keterampilan berorganisasi (*skill at organizing*), yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
8. Menghargai prestasi (*value of achievement over money*), yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang.

Martin dan Osberg (2007:hal.5) juga menyebutkan beberapa karakteristik penting yang dimiliki oleh para *entrepreneur*, yaitu:

1. *Inspired*. Seorang pengusaha akan terinspirasi untuk melakukan perubahan.
2. *Creative*. Seorang pengusaha berfikir kreatif dan mengembangkan solusi baru yang benar-benar berbeda dengan yang sudah ada.
3. *Direct Action*. Ketika seorang pengusaha telah terinspirasi dan berfikir kreatif maka mereka akan langsung bertindak memanifestasikan idenya ketimbang menunggu orang lain yang melakukannya.
4. *Courage*. Seorang pengusaha memiliki keteguhan hati dalam menjalani proses inovasi, berani menanggung resiko dan kegagalan.
5. *Fortitude*. Seorang pengusaha memiliki keuletan dalam membuahkan solusi kreatif melalui pemahaman akan pasar

Kemudian Dun Steinhoff dan John F.Burgess dalam (Suryana, 2013:hal.27) mengemukakan enam karakteritik yang diperlukan untuk menjadi wirausahawan yang berhasil, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki visi misi dan tujuan usaha yang jelas.
2. Bersedia menanggung risiko waktu dan uang.
3. Memiliki perencanaan yang matang dan mampu mengorganisasikannya.
4. Bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya.
5. Mengembangkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan pihak lain.
6. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan.

Peneliti menggarisbawahi bahwa karakteristik pendidikan karakter sangat menunjang terhadap semangat *entrepreneurship*, bahkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dapat diinternalisasikan, dan sejalan dengan nilai-nilai *civic entrepreneurship*.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner (angket) dan dokumentasi. Semua data berasal dari Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP Pasundan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data yang ada dalam bentuk angka. Setelah pengumpulan data penelitian selesai, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Dalam proses ini digunakan teknik analisis statistik. Hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan analisis statistik adalah kondisi semua harus baik, yaitu semua data harus memenuhi persyaratan statistik.

Hasil Penelitian

Ngainun Naim (2012: hal.21-56) Mengatakan karakter secara lebih jelas mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviours*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*). Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual, seperti berfikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk berkontribusi dengan

komunitas dan masyarakatnya. Dari kata karakter kemudian berkembang positif sebagai individu (intelektual, sosial, emosional, dan etika). Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Muchlas Samani & Haryanto (2013: hal.43) dalam jurnalnya mengatakan mengacu pada berbagai pengertian dan definisi karakter, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi karakter maka, karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa terbentuknya karakter bermula dari pengetahuan yang menjalar pada lingkungan dimana orang tersebut tinggal dan dengan siapa orang tersebut bergaul, terbentuknya karakter *civic entrepreneur* karena adanya motivasi seseorang untuk berpikir dan bertindak lebih baik dari rekannya, adanya keterlibatan dalam berwirausaha serta keterampilan dalam berwirausaha didasarkan atas pertimbangan seseorang dalam memilih mengenai pilihan karirnya sebagai wirausahawan.

Menurut John J, 2009 dalam Nur Syamsiah (2017 : hal.11) berkewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan resiko yang tepat, melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi manusia, uang dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan baik. Seperti yang dikatakan diatas bahwasannya karakter berwirausaha pada mahasiswa sangat erat kaitannya dengan usaha seseorang dalam menjalankan sebuah bisnisnya, karakter disini tidak lain ialah sebuah usaha yang tertanam dalam diri

seorang *entrepreneur* yang memiliki semangat dalam berbisnis.

Adapun menurut (Zimmerer, Scarborough, 2002) menjelaskan bahwa *Entrepreneur* adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru ditengah banyaknya resiko dan ketidakpastian sebagai sebuah tujuan untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan sumber daya yang penting sebagai modal utama. Menurut Drucker,1985(dalam Suryana, 2003) dalam bukunya *Innovation and Entrepreneurship* mengemukakan perkembangan teori kewirausahaan menjadi tiga tahapan : a) Teori yang mengutamakan peluang usaha. teori ini disebut teori ekonomi, yaitu wirausaha akan muncul dan berkembang apabila ada peluang ekonomi; b) Teori yang mengutamakan tanggapan orang terhadap peluang, yakni, teori Sosiologi, yang mencoba menerangkan mengapa beberapa kelompok sosial menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap peluang usaha dan teori psikologi yang mencoba menjawab karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha dan bukan wirausaha serta karakteristik perorangan yang membedakan wirausaha berhasil dan tidak berhasil dan c) Teori yang mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dengan hasilnya. Disebut dengan teori perilaku, yaitu yang mencoba memahami pola perilaku wirausaha. Kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai, karena kewirausahaan bisa merupakan pilihan kerja atau pilihan karir.

Kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang adalah karena hal itu dapat dipelajari. Peter F.Drucker, (dalam Suryana, 2004:hal.22) misalnya, pernah menulis dalam *Innovation and Entrepreneurship* bahwa, "Setiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dapat belajar menjadi wirausaha, dan berperilaku seperti wirausaha. Sebab kewirausahaan lebih merupakan perilaku dari pada gejala kepribadian, yang dasarnya terletak pada konsep dan teori, bukan pada intuisi, serta perilaku, konsep, dan teori

merupakan hal-hal yang dapat dipelajari oleh siapapun juga. Sepanjang kita bersedia membuka hati dan pikiran untuk belajar, maka kesempatan untuk menjadi wirausaha tetap terbuka.

Buchari Alma (2003:hal.16) menyatakan bahwa keahlian dan keterampilan wirausaha banyak didapatkan dari pendidikan kewirausahaan. Sikap, perilaku, dan minat ke arah kewirausahaan seorang mahasiswa dipengaruhi oleh pertimbangan atas berbagai aspek mengenai pilihan karir sebagai wirausahawan. Pertimbangan atas pilihan karir tersebut dapat berbeda-beda tergantung preferensi terhadap risiko yang akan mereka tanggung kemudian. Mahasiswa yang takut untuk mengambil risiko (*risk averter*) cenderung untuk memilih menjadi seorang pegawai swasta, atau PNS, sebagai pilihan karir sedangkan bagi mahasiswa yang berani mengambil risiko (*risk taker*) untuk meninggalkan *comfort zone* cenderung akan memilih menjadi seorang wirausahawan sebagai pilihan karirnya. Pilihan karir seseorang dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah Faktor demografis (gender, latar belakang pendidikan orang tua, dan pengalaman bekerja) yang dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang untuk menjadi wirausahawan. Pendidikan kewirausahaan dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku pada mahasiswa menjadi seorang wirausahawan (*entrepreneur*) sejati sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karir.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *entrepreneurship* ialah sikap yang disertai mental dan perilaku yang tertanam dalam setiap individu seseorang yang dalam hal ini menjalankan usaha dan kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup dirinya serta masyarakat pada umumnya.

Menurut (Iswandari, 2013) dalam (Flora Puspitaningsih :hal.227) pengetahuan kewirausahaan adalah keseluruhan apa yang

diketahui tentang segala bentuk informasi yang diolah dan berproses dalam ranah kognitif berupa ingatan dan pemahaman tentang cara berusaha sehingga menimbulkan keberanian mengambil resiko secara rasional dan logis dalam menangani suatu usaha. Pengetahuan kewirausahaan adalah semua informasi yang diperoleh dalam proses pelatihan dan pengalaman, yang digunakan sebagai pelatihan dan pemahaman, sehingga dapat mengarah pada kemampuan melihat resiko dan keberanian dalam menangani resiko-resiko ini. Pengetahuan kewirausahaan adalah pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman dan pembelajaran. Ada 3 aspek yang mempengaruhi pengetahuan kewirausahaan, yaitu: a) Mengambil resiko usaha, b) Menganalisis peluang usaha, c) Merumuskan solusi masalah.

Adapun menurut Salhi (2012:hal.227) menyatakan ada 4 indikator yang mempengaruhi dari pengetahuan kewirausahaan yaitu: (1) pengetahuan dasar kewirausahaan, minat berusaha perlu diwujudkan oleh adanya informasi untuk menemukan atau menciptakan peluang bisnis sehingga membantu mewujudkan usaha mereka. (2) pengetahuan ide dan peluang usaha, pembentukan minat berusaha dalam menghasilkan suatu usaha memerlukan adanya pemikiran atau hal-hal baru yang terstruktur. (3) pengetahuan tentang aspek-aspek usaha, informasi yang ada akan menciptakan suatu proses melalui berbagai hambatan serta resiko yang akan dilalui untuk mewujudkan usaha mereka

Dari beberapa sumber diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan yang harus dimiliki dalam berwirausaha bagi seseorang *entrepreneurship* harus mengetahui berbagai informasi yang terjadi saat ini, disamping mengetahui informasi seorang pelaku usaha harus mempunyai sikap pemberani, karena dari keberanian kita dapat memulai usaha dengan baik. Keberanian juga menjadi salahsatu modal utama dalam membangun sebuah usaha.

Tabel 4.1 Hasil Pengolahan variabel Y_{3.1}
(Seorang *civic entrepreneur* harus memiliki sikap kreatif)

Y _{3.1}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2.1	2.1	2.1
	S	20	41.7	41.7	43.8
	SS	27	56.3	56.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Sumber: Output Statistical Products and Service Solutions for Windows versi 25

Pada **Tabel 4.1** pernyataan **Seorang *civic entrepreneur* harus memiliki sikap kreatif**. Untuk variabel Y_{3.1} hasilnya 56,3% responden menjawab sangat setuju, 41,7% responden menjawab setuju dan 2,1% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan presentase tersebut, jawaban yang paling mendominasi adalah “Sangat Setuju” pada pernyataan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Seorang *civic entrepreneur* harus memiliki sikap kreatif.

Tabel 4.2 Hasil Pengolahan variabel Y_{3.2}
(Sikap kreatif tidak diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha)

Y _{3.4}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.1	2.1	2.1
	S	16	33.3	33.3	35.4
	SS	31	64.6	64.6	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Sumber: Output Statistical Products and Service Solutions for Windows versi 25

Pada **Tabel 4.2** pernyataan **Sikap kreatif tidak diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha**. Untuk variabel Y_{3.2} hasilnya 6,3% responden menjawab sangat setuju, 8,3% responden menjawab setuju, 45,8% responden menjawab tidak setuju dan 39,6% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan presentase tersebut, jawaban yang paling mendominasi adalah “Tidak Setuju” pada

pernyataan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan Sikap kreatif tidak diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha. Dari pernyataan tersebut kebanyakan responden menjawab tidak setuju.

Tabel 4.3 Hasil Pengolahan variabel Y_{3.3}
(Seorang *civic entrepreneur* tidak perlu memiliki *attitudes* yang baik)

Y _{3.3}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	1	2.1	2.1	2.1
	S	2	4.2	4.2	6.3
	TS	19	39.6	39.6	45.8
	STS	26	54.2	54.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Sumber: Output Statistical Products and Service Solutions for Windows versi 25

Pada **Tabel 4.3** pernyataan **Seorang *civic entrepreneur* tidak perlu memiliki *attitudes* yang baik**. Untuk variabel Y_{3.3} hasilnya 2,1% responden menjawab sangat setuju, 4,2% responden menjawab setuju, 39,6% responden menjawab tidak setuju dan 54,2% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan presentase tersebut, jawaban yang paling mendominasi adalah “Sangat Tidak Setuju” pada pernyataan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan Sikap kreatif tidak diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha Seorang *civic entrepreneur* tidak perlu memiliki *attitudes* yang baik. Dari pernyataan tersebut kebanyakan responden menjawab sangat tidak setuju.

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan variabel Y_{3.4}
(Sebagai pelaku usaha kita perlu berperilaku baik terhadap konsumen)

Y _{3.2}					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SS	3	6.3	6.3	6.3
	S	4	8.3	8.3	14.6
	TS	22	45.8	45.8	60.4
	STS	19	39.6	39.6	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Sumber: Output Statistical Products and Service Solutions for Windows versi 25

Pada **Tabel 4.4** pernyataan **Sebagai pelaku usaha kita perlu berperilaku baik terhadap konsumen**. Untuk variabel Y.3.4 hasilnya 64,6% responden menjawab sangat setuju, 33,3% responden menjawab setuju dan 2,1% responden menjawab tidak setuju. Berdasarkan presentase tersebut, jawaban yang paling mendominasi adalah “Sangat Setuju” pada pernyataan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Sebagai pelaku usaha kita perlu berperilaku baik terhadap konsumen.

Tabel 4.5 Hasil Pengolahan 10variable Y.3.5 (Motivasi memberikan pengaruh besar bagi pebisnis dalam menentukan kemana variabel selanjutnya agar tujuan bisnis bisa dicapai)

Y3.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	22	45.8	45.8	45.8
	SS	26	54.2	54.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Sumber: *Output Statistical Products and Service Solutions for Windows* versi 25

Pada **Tabel 4.5** pernyataan **Motivasi memberikan pengaruh besar bagi pebisnis dalam menentukan kemana 10variabl selanjutnya agar tujuan bisnis bisa dicapai**. Untuk variable Y.3.5 hasilnya 54,2% responden menjawab sangat setuju, dan 45,8% responden menjawab setuju. Berdasarkan presentase tersebut, jawaban yang paling mendominasi adalah “Sangat Setuju” pada pernyataan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi memberikan pengaruh besar bagi pebisnis dalam menentukan kemana variabel selanjutnya agar tujuan bisnis bisa dicapai.

Tabel 4.6 Hasil Pengolahan 10variable Y.3.6 (Kemampuan/keterampilan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam wirausaha)

Sumber: *Output Statistical Products and Service Solutions for Windows* versi 25

Pada **Tabel 4.6** pernyataan **Kemampuan/keterampilan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam wirausaha**. Untuk variable Y.3.6 hasilnya

56,3% responden menjawab sangat setuju, dan 43,8% responden menjawab setuju. Berdasarkan presentase tersebut, jawaban yang paling mendominasi adalah “Sangat Setuju” pada pernyataan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Kemampuan/keterampilan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam wirausaha

Tabel 4.7 Hasil Pengolahan 10variable Y.3.7 (Terampil dalam mengambil sebuah keputusan sedikitnya dapat mengatasi permasalahan dalam wirausaha)

Y3.7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	26	54.2	54.2	54.2
	SS	22	45.8	45.8	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

Sumber: *Output Statistical Products and Service Solutions for Windows* versi 25

Pada **Tabel 4.7** pernyataan **Terampil dalam mengambil sebuah keputusan sedikitnya dapat mengatasi permasalahan dalam wirausaha**. Untuk variable Y.3.7 hasilnya 45,8% responden menjawab sangat setuju, dan 54,2% responden menjawab setuju. Berdasarkan presentase tersebut, jawaban yang paling mendominasi adalah “Setuju” pada pernyataan yang diajukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Terampil dalam mengambil sebuah keputusan sedikitnya dapat mengatasi permasalahan dalam wirausaha.

KESIMPULAN

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Karakter *Civic Entrepreneur* pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP Pasundan, setelah dilakukan pengujian hipotesis maka dapat ditarik

Y3.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	43.8	43.8	43.8
	SS	27	56.3	56.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

kesimpulan bahwa pada hasil pengujian data terhadap variabel Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Karakter Civic Entrepreneurship Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) STKIP Pasundan sebesar 45,7% dan 54,3% ditentukan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

REFERENCES

- Alma, B. 2003. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta.
- Branson, M. S. (1999). Belajar Civic Education Dari Amerika (Syafuruddin, M. Y. Alimi, & M. N. Khoiron, Penerj.). Yogyakarta: Lkis.
- Fearnley-Sander, M., & Ella, Y. (2008). *Citizenship Discourse In The Context Of Decentralisation: The Case Of Indonesia*. In D. L. Grossman, W. O. Lee, & K. J. Kennedy (Ed.), *Citizenship Curriculum In Asia And The Pacific* (Hal. 111–126). Harapan, Naskah Juara, Lomba Karya, Tulis Ilmiah, Dosen Ta, and Fakultas Ekonomi Unisba. 2005. "Naskah Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen TA 2004/2005 Dr. Muhardi, SE.,M.Si., Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba." XX(4):478–92.
- Liem, G. A. D., & Mcinerney, D. M. (2010). *Indonesian Students And Their Citizenship-Related Attributes: Implications For Instructional Strategies And Pedagogical Practices In Civic Education*. In K. J. Kennedy, W. O. Lee, & D. L. Grossman (Ed.), *Citizenship Pedagogies In Asia And The Pacific* (Hal. 149–174). Hong Kong: Springer & Comparative Education Research Center, The University Of Hong Kong.
- Martin, Roger and Sally Osberg. 2007. "Social Entrepreneurhip: The Case of Definition". Stanford Social Innovation Review
- Muti'ah dan Anwar. 2021. "Jurnal Fair Value." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 04(01):27–39.
- Muchlas Samani & Hariyanto. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011), h.43
- Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 49–56
- Nur Syamsiah. (2017). Karakter Berwirausaha. Kudus: STAIN Kudus
- Puspitaningsih, F. (2014). Pengaruh Efikasi Diri dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Motivasi. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2(2), 223–235.
- Sonjaya, R. (2017). *PERANAN PEMBELAJARAN PPKN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA DI SMPN 26 BANDUNG (Penelitian Analitis Deskriptif Kualitatif dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Kelas VIII SMPN 26 Bandung)* (Doctoral dissertation, FKIP Unpas).
- Surya, Mohamad. 2004. "Pendidikan Murah, Mungkinkah?" Dalam Pikiran Rakyat 5 Juni. Bandung: PT. Percetakan Offset GRANESIA.
- Suryana, 2003. Kewirausahaan, Pedoman

- Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses,
Salemba Empat, Bandung
- Suryana, 2004. Memahami Karakteristik
Kewirausahaan, Modul, Jakarta:
Depdiknas
- Suryana.(2013).kewirausahaan kiat dan
proses menuju sukses. Jakarta: Salemba
Empat
- Somantri, M. N. (2001). Menggagas
Pembaharuan Pendidikan IPS.
Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Trihastuti, Meiwatizal (2021). Model
Konseptual Civic Entrepreneurship
Melalui KOPMA Dalam Membina
Kemandirian Ekonomi Di Era Digital
(Disertasi Doktoral, Universitas
Pendidikan Indonesia, 2021)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (2003).
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). Teori dan
landasan Pendidikan
Kewarganegaraan. Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2001). Jatidiri
Pendidikan Kewarganegaraan.
Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Perspektif
Pendidikan untuk Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa (Gagasan,
Instrumentasi, dan Praksis). Widya
Aksara Press.
- Winataputra, U. S. (2015). Pendidikan
Kewarganegaraan: Refleksi Historis-
Epistemologis Dan Rekonstruksi Untuk
Masa Depan. Tangerang Selatan:
Universitas Terbuka.

Undang-Undang:

- Undang-Undang 1945 Bab XIII, Pasal 31 ayat
(2)
- Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pendidikan Tinggi

Internet:

- Pgsd.upy.ac.id diakses melalui
[https://pgsd.upy.ac.id/index.php/8-
artikel-pendidikan/11-pengertian](https://pgsd.upy.ac.id/index.php/8-artikel-pendidikan/11-pengertian). [6
juli 2022].